

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(SUATU STUDI PADA KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR)**

**Oleh:
SURAWI
NPM :1111408546**

ABSTRAK

BNN adalah lembaga yg berhubungan dgn narkotika selain dari kepolisian dan pengadilan, narkotika adalah masalah disetiap daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep yang menjadi masalah adalah kurangnya sumberdaya pada pegawai BNNK Sumenep sehingga menjadi kurang efektifnya dalam memberantas peredaran narkoba khususnya pada kepulauan.

Dalam mengukur Implementasi suatu Kebijakan penulis berpatokan pada Teori Edward III dimana terdapat Empat poin untuk mengukurnya yaitu dgn Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi, penelitian ini mengambil teknik analisis data dgn metode deskriptif kualitatif, didalam penelitian terdiri dari enam informan yaitu kepala bidang pencegahan, anggota bidang pemberantasan dan kepala bidang rehabilitasi juga satu orang pada kasubbag umum , peneliti juga mewawancarai masyarakat yaitu satu orang mahasiswa dan satu orang masyarakat kepulauan

Setelah dilaksanakanya penelitian terkait Implementasi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika berjalan baik sesuai dgn rencana kerja tahunan serta memenuhi target implementasinya, yang menjadi hambatan dari mengimplementasi kan kebijakan, pada segi fasilitas yang kurang cukup memadai, juga SumberDayaManusia dimana BNNKSumenep belum tercapai minimal jumlah pegawai yang di tetapkan oleh BNN Republik Indonesia dimana dalam seksi pemberantasan hanya memiliki empat anggota sehingga pada pelaksanaan terhadap wilayah kepulauan kurang optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING
NARCOTICS (A Study In The National Narcotics Agency In Sumenep
District)**

By
SURAWI
(1111408546)

ABSTRACT

The NNA is one of the institutions dealing with narcotic other than the police and courts, narcotics is a problem for every region in Indonesia, including in Sumenep Regency, which is a problem with the lack of resources for Sumenep National Narcotics Agency employees to be less effective in combating drug trafficking, especially on islands.

In measuring Policy Implementation the writer is guided by Edward III Theory which where there are Four points to measure it namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, researchers take data analysis techniques with qualitative descriptive methods, in this study consisted of six informants namely in in the field of prevention of one person in the field of eradication and one person in the field of rehabilitation also one person in the general head of the subdivision, researchers also interviewed the community namely one student and one community member

After the implementation of the research related to the implementation of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics went well in accordance with the annual work plan and fulfilled the implementation target, but it was an obstacle in implementing this policy in terms of inadequate facilities, as well as the Human Resources where the National Narcotics Agency Sumenep has not fulfilled the minimum number of ideal employees set by the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia, which in the eradication section only has four members so that the implementation of the archipelago is less than optimal.

Keywords: Implementation, Policy, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics

Pendahuluan

Indonesia sedang menghadapi keadaan yg mengkhawatirkan dikarenakan banyaknya pemakaian narkotika yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkotika ini ternyata tidak hanya pada kota besar namun merambah ke pelosok-pelosok negeri tidak terkecuali di Kabupaten Sumenep. Secara geografis Kabupaten Sumenep terletak di sebelah timur pulau Madura, jaraknya sekitar 100 KM dari ujung timur Pulau Madura. Jarak yang cukup jauh tersebut menyebabkan Kabupaten Sumenep kurang mempunyai akses sehingga akses pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Sumenep akan pentingnya bahaya narkotika. Pemakaian Narkotika adalah perilaku yang bertentangan dengan UU. pemakaian Narkotika merambah kedalam lapisan masyarakat dan masalah Narkotika sudah menjadi permasalahan yang serius. Sejak tahun 1997, Pemerintah sudah merespon terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan mengeluarkannya UU RI Nomer 5 Thn 1997 Ttg Psikotropika, sehingga sejak saat itu penggunaan dan penyebaran Narkotika diawasi ketat oleh pemerintah. Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang mengenai Narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang merupakan pembaharuan dari UU yang lama No. 22 Tahun 1997. UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika disatu sisi adalah obat dan disisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian yang ketat dan seksama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep

Landasan Teori

Konsep Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20), “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pengertian

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Model George Edward III

Edward dalam Winarno (2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh implementor.

Disposisi

Disposisi adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini ttg implementasi UU nomer 35 thn 2009 tentang narkoba pada bnnkabupaten sumenep dallam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Pembahasan

hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di BNN Kabupaten Sumenep, pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis implementasi kebijakan UU nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba pada BNNK Kabupaten Sumenep adalah teori yang dikemukakan oleh George Edward III,

Komunikasi

Berdasarkan wawancara, obserfasi dilaksanakan sehingga disimpulkan penyampaian informasi pada masyarakat dan lembaga yang sudah bekerjasama telah berjalan sebagaimana yang telah ditentukan, pd penyampaian informasi kpd masyarakat dan lembaga yang telah bekerjasama telah terlaksana sesuai dengan harapan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akan bahaya narkoba kepada masyarakat Sumenep

SumberDaya

Hasil daripada wawancara yang telah dilakukan bahwa pada sdm di BNN Kab Sumenep kurang dan juga tidak mencapai angka yang sudah ditetapkan oleh BNN Republik Indonesia, dikasi pemberantasan hanya terdapat 4 anggota saja. Anggaran yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep belum terpenuhi sehingga untuk melaksanakan kegiatan dalam pemberantasan masih terbatas. Mengingat kabupaten sumenep terdapat banyak pulau-pulau dimana untuk memberantas dalam wilayah kepulauan masih terkendala, hanya yang dilakukan BNNK sumenep khususnya kasi pemberantasan dengan melakukan kegiatan tes urine di pelabuhan kepada sahbandar kapal yang akan berlayar ke kepulauan yang ada di sumenep.

Disposisi

hasil dari wawancara yang dilakukan BNNK Sumenep pada ibidang p2m belum mengikuti pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh BNN Republik Indonesia atau BNN Provinsi namun sering mengikuti rapat koordinasi. Kepala BNNK Sumenep, pada kaSie Pemberantasan telh mengikuti pelatihan yang dibuat oleh

Struktur Birokrasi

dari hasil wawancara dan obserfasi sehingga disimpulkan staff BNNK Sumenep pd dibidang pencegahan p2m, pemberantasan, dan rehabilitasi telah sesuai pd Prosedur dan sejalan dg tugas dan fungsinya masing-masing pada bidangnya contoh pd bidang Rehabilitasi sudah ada Standar prosedur operasional dalam pelaksanaan rehabilitasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian ini terkait Implementasi UU nomer 35 thn 2009 Tentang Narkotika pada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumenep dengan menggunakan teori George Edward III, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan belum terlaksana dengan baik karena yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan ini padai SDM, anggaran, dan juga fasilitas yang kurang memadai. Menurut Teori Implementasi Kebijakan dalam model George Edward III dalam menentukan suatu keberhasilannya implementasi terdapat empat variabel:

Komunikasi, sudah maksimal karena Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep bidang (P2M) sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang diadakan rutin setiap tahunnya guna mencegah peredaran narkoba dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan bahaya Narkoba.

Sumber Daya, sumber daya manusia pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep kurang memadai karena pada bidang pemberantasan hanya memiliki empat anggota mengingat kabupaten sumenep terdapat banyak pulau-pulau dimana dalam pemberantasannya membutuhkan anggota yang lebih.

Disposisi, pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep berkaitan dengan konsistensi implementor sudah maksimal dimana dalam kegiatan yang diadakan oleh BNN Republik Indonesia selalu di ikuti.

Struktur Birokrasi, Standart Operasional Prosedur pada BNNK Sumenep sudah ada dimana dalam bidang rehabilitasi sudah ada pelaksanaan rawat jalan.

Saran

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai macam metode, peneliti memiliki beberapa saran guna memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan pada Badan Narkotika Nasional Kab Sumenep agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan semestinya serta kedepannya bisa terimplementasikan dengan baik. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan narkoba kepada masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep untuk meminimalisir bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba.
2. BNN Kabupaten Sumenep Harus mengusulkan penambahan personil atau pegawai
3. Pada wilayah Kepulauan BNNK Sumenep harus lebih giat lagi melakukan Razia di pelabuhan Kalianget karena pelabuhan Kalianget merupakan salah satu dari akses masuknya peredaran Narkoba di Kepulauan yang ada di Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. (2008).

Arifin, Burhan, *Narkoba dan Permasalahannya*. PT Bengawan Ilmu. Semarang, Tahun (2007).

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Kencana. Jakarta, Tahun (2015).

BNN Kabupaten Sumenep, *Profil BNN Kabupaten Sumenep*. Tahun (2018).

Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press (2003)

Fatthoni, Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, Tahun (2016).

Henslin M. James, *Sosiologi dengan pendekatan Membumi*, Edisi 6 Jilid 2. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta, Tahun (2006).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep.

Jimmy, Simangunsong, implementasi UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh BNN kota mengenai *PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional di Kota Tanjung pinang)*. Skripsi, Tahun (2015).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Milles, Matthw, BA. Michel, Hubermen. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. Tahun (1992).

- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung, Tahun (2010).
- Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam proses belajar dan mengajar*. Bumi Aksara. Jakarta, Tahun (2010).
- Partodirharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama. Jakarta, Tahun 2006.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *ciri-ciri perilaku menyimpang pada remaja*, Jakarta, Tahun (1996)
- Sjafi'i A, Koesbandrijo B, Pujiyanto A, Jupriono, Rukminingsih N, Tjahjono E, Sudaryanto E. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Prenadamedia Group. Jakarta, Tahun (2016)
- Suharno.. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. (2013)
- Supriadi Jepri, *"Implementasi Kebijakan BNN P4GN kota tanjung pinang"* tahun (2015)
- UU Nomor 22, *tentang Narkotika*. Tahun (1997)
- UU Nomer 35, *tentang Narkotika*. Tahun (2009)
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara. (2004).
- Winarno, Budi.. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: C A P S. (2012)
- Wulandari Tri, *implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di BNNP DIY*, Tahun (2016)
- Yashinta, Winda Afriastini, *implementasi UU nomor 35 oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI YOGYAKARTA*. Skripsi, Tahun (2013).